

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal-usul negara Republik Libanon adalah sebuah *al-mutasharrifiyyah* yang didirikan di Mount Libanon oleh kerajaan Turki Usmani sebagai salah sebuah *sanjaq* (propinsi)nya pada tahun 1860. Pada saat itu Libanon hanya mencakup daerah pegunungan yang didominasi oleh orang Maronite dan Druze. Sanjaq ini didirikan atas desakan negara-negara Eropa khususnya Perancis, yang merasa bahwa golongan Kristen Maronite mendapat perlakuan yang tidak adil dari golongan muslim sesama warga Libanon, khususnya sekte Druze. Sanjaq ini diharapkan akan mampu memberikan perlindungan dan kedudukan politik yang istimewa kepada golongan Kristen, khususnya sekte Maronite¹.

Pasca Perang Dunia I (1914-1918), kekuasaan Ottoman berakhir di Libanon. Peristiwa ini menyebabkan Libanon berlalih mandat kepada Perancis. Perancis pada tahun 1920 membentuk *Greater Lebanon* (Lebanon raya) yang memasukkan daerah-daerah lain ke wilayah Libanon seperti Beirut, Sidon, Tyre, Lebanon Selatan, Lembah Bekaa dan dataran Akkar di sebelah utara. Saat ini wilayah Libanon mempunyai luas 10.400 km² yang berbatasan dengan Syria sebelah utara dan timur serta Israel disebelah Selatan. Sedangkan di sisi barat menghadap Laut Mediteran.

¹ Abbas Kelidar and Michael Burrel, *Lebanon : The Collapase of State*, Conflict Studies, No.74 August-1976, halaman 3.

Dengan terjadinya perluasan wilayah tersebut mengakibatkan beranca ragamnya kelompok-kelompok keagamaan di Libanon Di Libanon sendiri saat ini terdapat dua golongan agama yaitu golongan Muslim dan golongan Kristen. Namun dua golongan agama tadi masih terpecah lagi menjadi beberapa sekte. Dalam golongan Kristen dikenal sekte-sekte : Maronite, Yunani Katholik, Yunani Orthodox, Armenia Katholik, Armenia Orthodox, Protestan dan sekte-sekte kecil lainnya. Sedangkan golongan Muslim terbagi menjadi dua sekte : Sunni dan Syiah. Adapun sekte Druze sebenarnya adalah pecahan dari sekte Syiah.

Karena golongan Kristen mempunyai ikatan sejarah dan keagamaan dengan negara-negara Eropa khususnya Perancis, Italia dan Yunani, mereka memandang Libanon sebagai suatu bagian integral dari peradaban Eropa. Sedangkan golongan Muslim memandang Libanon sebagai bagian dari dunia Arab dan Islam karena kesatuan agama dan juga bahasa mereka. Perbedaan persepsi antara golongan Muslim dan Kristen juga dikaitkan dengan latar belakang ekonomi. Pada umumnya, golongan Muslim dipandang sebagai golongan ekonomi lemah sedangkan golongan Kristen dipandang sebagai golongan ekonomi kuat.

Pada waktu Libanon mendapatkan kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1941, kedudukan golongan Kristen sudah sedemikian mantap baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Kedudukan ini kemudian mendapatkan pengakuan hukum yang sah dari rakyat Libanon sesudah diumumkankannya *The Lebanese National Covenant* yang kemudian dikenal dengan Pakta Nasional 1943. Perjanjian ini merupakan suatu persetujuan tak tertulis antara pemimpin-pemimpin agama yang ada

di Lebanon dengan Presiden dan Perdana Menteri Republik Lebanon pada waktu itu. Isi perjanjian ini merupakan aturan tentang pembagian jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan lembaga perwakilan serta kemiliteran, berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang ada disana. Disebutkan pula bahwa Presiden Republik Lebanon adalah seorang pemeluk Kristen Maronite, Perdana Menteri adalah seorang pemeluk Muslim Sunni sedangkan ketua parlemen adalah seorang Muslim Syiah. Jabatan panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Dinas kepolisian dipegang oleh pemeluk Kristen maronite².

Pakta Nasional ini menetapkan bahwa pemerintah seyogianya bekerja menghilangkan sistem sektarian. Sebab, sistem seperti itu merupakan hambatan bagi kemajuan nasional, dan akan menjadi racun bagi hubungan antara elemen di masyarakat. Akan tetapi, sebuah kenyataan bahwa tidak mudah menghilangkan sektarianisme itu. Hal semacam itulah yang hingga kini masih membayangi Lebanon.

Republik Lebanon sendiri menganut sistem parlementer. Parlemen inilah yang memilih presiden, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepadanya. Presiden dapat membuat undang-undang tanpa partisipasi parlemen. Disamping itu presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, termasuk perdana menteri³. Dalam parlemen sekte Maronite memainkan peranan penting. Merekalah yang menjadi tulang punggung golongan kristen disana. Hal ini disebabkan sekte Maronite

² Trias Kuncahyono, *Lebanon, Sektarianisme, dan Pemilu* online (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/19/ln/1822863.htm>) diakses Juni 2005

³ *Ensiklopedi Negara dan Bangsa*, jilid 4, cetakan pertama, Grolier International Press 1988, hal. 3

selalu menduduki sepertiga kursi dalam parlemen. Dari 128 kursi parlemen, 34 kursi diduduki oleh wakil sekte ini.

Dengan adanya fenomena ketimpangan distribusi kekuasaan antar golongan dalam pemerintahan Libanon seperti digambarkan diatas mengakibatkan terjadinya Perang saudara pertama di Lebanon pada tahun 1958. Perang ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muslim dan golongan kristen mengenai kebijakan politik pemerintah dan pembagian kekuasaan antar golongan yang tak dapat diatasi. Perang saudara berhasil dihentikan dengan bantuan 10.000 pasukan Amerika yang diundang atas permintaan Presiden Kamil Sham'un. Bibit konflik mulai muncul kembali ketika Presiden Fuad Shihab yang menggantikan Presiden kamil Sham'un, tidak menepati janjinya kepada golongan muslim untuk memperlakukan perbaikan dan perluasan hak bagi golongan muslim. Walau merasa tidak puas golongan muslim tidak dapat berbuat banyak karena tak ada kekuatan ekonomi dan militer yang mendukung.

Sejak Perang Arab-Israel 1967 dan Peristiwa *Black September*⁴ di Yordania tahun 1970, orang-orang Palestina menjadi satu kekuatan politik yang cukup tangguh di Libanon⁵. Sejak saat itu yang datang ke Libanon bukan hanya orang-orang Palestina dari kalangan sipil, tetapi juga dari para gerilyawan yang bersenjata. Dengan adanya pengungsian orang Palestina ini kekuatan milisi golongan muslim

⁴ Bulan September 1970, di Yordania terjadi pertempuran antara pasukan Kerajaan Yordania dan para pejuang Palestina. Ribuan orang Palestina terusir dari Yordania atau terbunuh. Oleh orang palestina peristiwa itu dinamakan "Black September"

⁵ Nikola B. Schlgaldian, *Prospects for a Unified Lebanon*, Current History January 1984, Halaman 8.

Lebanon semakin meningkat. Para pengungsi dengan senang hati membantu golongan muslim dalam perjuangan menentang dominasi golongan kristen. Dukungan para gerilya palestina inilah yang merupakan suatu unsur mutlak yang turut mempercepat pematangan situasi menjelang meletusnya Perang Saudara 1975.

Perang saudara tahun 1975 mendorong golongan-golongan masyarakat yang bertikai untuk mencari bantuan dari pihak asing yang berbeda. Dilain pihak beberapa negara asing menganggap lebanon sangat mutlak bagi kepentingan dan keamanan nasionalnya, sehingga perlu mengadakan campurtangan apabila timbul pertikaian di dalam negara Lebanon. Pihak asing yang paling berperan dalam Perang Saudara Lebanon pada saat itu adalah Suriah, Israel dan Amerika.

Suriah pertama kali masuk Lebanon pada bulan Januari 1976, intervensi Suriah dimaksudkan untuk menghentikan terjadinya Perang Saudara di Lebanon saat itu. Suriah bertekad untuk melawan setiap usaha pihak manapun yang ingin menggagalkan perdamaian yang diprakarsainya. Karena itulah terjadi beberapa kali perubahan sikap Suriah dalam mendukung dua kubu yang bertikai pada perang saudara tahun 1975 tersebut. Pada awalnya Suriah mendukung aliansi Muslim dan PLO melawan Kristen. Akan tetapi, ketika ada tanda-tanda bahwa aliansi tersebut unggul dan meraih kemenangan pada Mei 1976, Suriah segera berubah sikap yakni mendukung Pemerintah Lebanon Kristen. Meskipun demikian, tidak selamanya tentara Suriah bergandengan tangan dengan kelompok milisi Kristen, sebab di waktu

lain mereka bersama-sama kelompok Muslim dan pejuang Palestina melawan milisi Kristen⁶.

Keberadaan militer Suriah di Lebanon dengan misi perdamaiannya dan ingin memulihkan kondisi Lebanon yang porak poranda akibat perang saudara, menimbulkan rasa simpati dari sebagian rakyat Lebanon. Ditambah lagi dengan dukungan Liga Arab dalam pembentukan pasukan perdamaian Arab yang didominasi pasukan Suriah, menambah legitimasi yang kuat bagi keberadaan pasukan Suriah di Lebanon.

Pada April 1981 ketegangan terjadi lagi ketika pasukan Suriah mengepung kota Zehle di Lembah Bekaa –daerah jantung dalam wilayah kekuasaan Lebanon-. Masalahnya, Suriah menuduh milisi Khata'ib pimpinan Bashir Gamayel yang berusaha menguasai Zahle dan menghubungkan kota itu dengan wilayah Israel. Ketika Suriah berusaha menggagalkan usaha milisi Khata'ib itu dua pesawat helikopter suriah ditembak jatuh oleh serdadu Israel sehingga Suriah memasang rudal Sam buatan Uni Sovyet di Lembah Bekaa. Dengan munculnya “krisis peluru kendali” pada April 1981 dominasi Suriah atas krisis di Lebanon mencapai puncak kemerosotan karena Suriah terperangkap dalam resiko perang melawan Israel – suatu hal yang tidak diinginkan Suriah sejak awal intervensinya ke Lebanon – ditengah misi perdamaiannya di Lebanon.

Pada tahun 1982 Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon setelah menduduki wilayah selatan selama empat tahun. Invasi tersebut dinamakan

*Operation Peace For Galilee*⁷ (Operasi Damai untuk Galilea) dengan alasan utama sebagai langkah untuk menjamin keamanan dan pertahanan Israel khususnya dari serangan gerilya Hizbullah di Lebanon Selatan. Suriah dipaksa mundur ke Lembah Bekaa, Lebanon selatan, setelah Israel merebut Beirut dan mengangkat sekutu Kristen ke tampuk kekuasaan serta mengusir gerilyawan Palestina dari Lebanon. Namun pasukan Suriah kembali ke Beirut pada 1987 untuk mengakhiri pertempuran antarkelompok muslim. Setelah itu pasukan Suriah kembali mempunyai pengaruh yang kuat di hampir semua wilayah Lebanon kecuali Lebanon Selatan yang dikuasai Israel.

Ketika Israel mundur dari Lebanon Selatan pada tahun 2000 Suriah semakin memperkokoh basis militernya di Lebanon. Suriah telah mengerahkan kembali atau menarik tentara lima kali. Jumlah tentara dikurangi menjadi 14.000 dan sebagian besar bergerak dari wilayah Beirut. Gerakan-gerakan tentara itu hanyalah kosmetik karena aparat intelijen dan keamanan masih berada di Lebanon, memperkuat kontrol politik, militer, dan ekonomi Suriah atas tetangganya yang lebih kecil⁸. Kuatnya kehadiran militer Suriah di Lebanon tidak terlepas dari pemerintahan dan rakyat Lebanon sendiri yang tidak memperlmasalahkan campur tangan militer Suriah di Lebanon sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas dalam negeri Lebanon. Selain itu Suriah juga menanamkan pengaruh politik yang kuat dengan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan di parlemen maupun eksekutif yang pro terhadap kehadiran

⁷ A. Mack, *Israel Lebanon War*, Australian Outlook April 1983, halaman 1.

⁸ *Suriah Mundur ke Selatan Bulan ini* <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/08/int04.htm> diakses pada : Februari 2005

militer Suriah di Lebanon.

Sejak militer Suriah masuk ke Lebanon, negeri itu relatif stabil. Pergantian pemerintahan berjalan mulus. Kegiatan ekonomi mulai menggeliat, dan julukan sebagai 'Paris Timur Tengah' pun kembali disandang Lebanon. Julukan itu untuk menggambarkan betapa Lebanon merupakan pusat seni, budaya, dan wisata bagi kawasan Timur Tengah. Dalam masa 15 tahun kestabilan politik dan keamanan itu, beberapa kali Lebanon pun menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan internasional. Dari seminar, konferensi, kontes, hingga pertemuan tingkat tinggi para kepala negara pemerintah. Kondisi Lebanon yang semakin membaik menciptakan stigma baru di masyarakat bahwa perubahan yang terjadi juga tidak terlepas dari peran militer Suriah dalam menjaga stabilitas keamanan di Lebanon.

Suatu perubahan dan peristiwa yang sangat tidak diduga banyak pihak didalam percaturan politik dalam negeri Lebanon ketika pada 5 Maret 2005, Suriah melalui Presidennya Bashar Al Assad, mengumumkan secara resmi akan merelokasi militernya dengan persetujuan pemerintah Lebanon. Kemudian pada 7 Maret 2005, dilanjutkan dengan pembicaraan resmi kedua negara tentang persetujuan dan tahapan relokasi militer Suriah. Dan 26 April 2005, secara resmi Suriah mengakhiri keberadaan militernya di Lebanon dengan keluarnya seluruh pasukan Suriah melalui perbatasan kedua negara di Lebanon Selatan.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar Belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Libanon menyetujui merelokasi militer Suriah yang telah berada selama 29 tahun (1976-2005) di Libanon?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk memahami permasalahan diatas penulis menggunakan Teori Pembuatan Keputusan (*decision making theory*) oleh W.D. Coplin. Sebelumnya, dalam pembahasan masalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Libanon digunakan *decision making process approach*, mengingat bahwa masalah perumusan kebijaksanaan politik suatu negara tidak bisa dilepaskan dari masalah proses pembuatan keputusan dan di pihak lain terlihat bahwa kebijakan merelokasi militer Suriah merupakan salah satu akibat dari kebijaksanaan politik yang dibuat oleh para penguasa..

Decision making process approach adalah suatu pendekatan melalui proses pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Menurut Joseph Frankel, "*decision making constitutes a process ending in an act of will person or a group of persons who choose between two or more alternatives*".⁹ Jadi dalam hal ini, seorang atau sekelompok orang dihadapkan pada dua atau lebih alternatif pilihan, sedangkan

⁹ Joseph Frankel, *The Making of Foreign Policy, An Analysis of Decision Making*, Oxford University Press 1968, halaman 4.

penentuan pilihan tu sendiri harus disesuaikan dengan tujuan, saran dan kemampuan yang tersedia.

Secara singkat *decision making process* dapat difahami dengan melihat adanya unsur input dan output dalam setiap pembuatan keputusan dari suatu masyarakat atau negara. Unsur input datang dari masyarakat berupa *demands* yang biasanya disalurkan melalui lembaga-lembaga politik ataupun kekuatan politik yang hidup dalam masyarakat. Proses penyaluran *demans* ini sangat tergantung pada sistem politik yang berlangsung dalam masalah tersebut. Unsur output berwujud dalam bentuk *policy*. Dari *policy* ini diharapkan dapat timbul *feedback* atau umpan balik yang berupa dukungan masyarakat terhadap *policy* yang ditempuh oleh pemerintah.

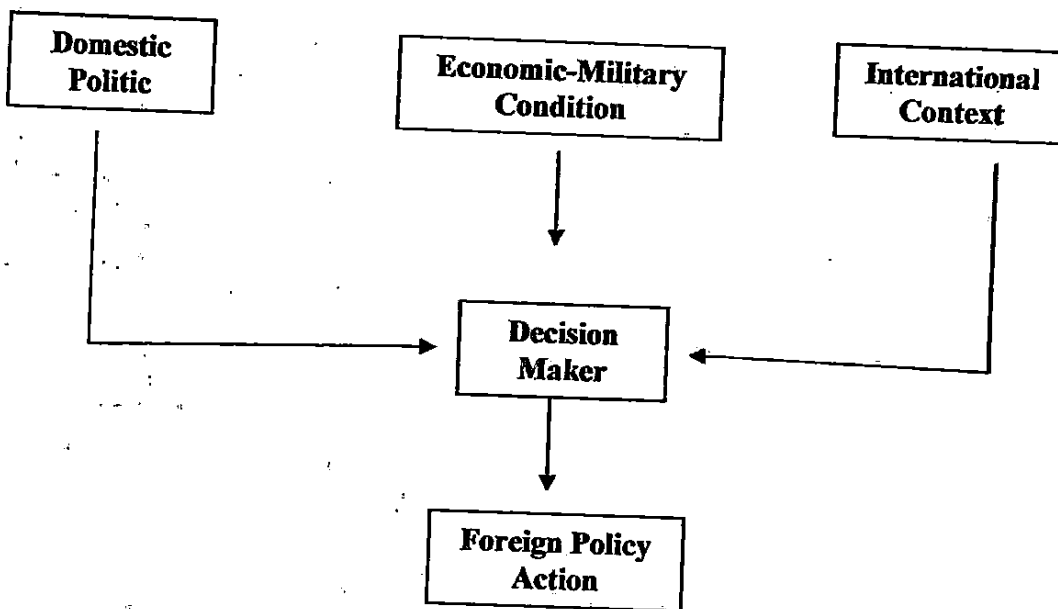
Kebijakan yang diambil oleh Libanon merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan yang menggunakan alur input dan output. Dimana pemerintah Libanon mempertimbangkan *demans* yang muncul dari dalam dan luar pemerintahan mengenai relokasi militer Suriah, yang kemudian di jawab dengan keluarnya kebijakan sebagai langkah untuk mencari dukungan kepada pemerintah.

Teori pembuatan keputusan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Copplin dapat digunakan sebagai pisau analisa untuk mengkaji lebih lanjut kepentingan dan kebijakan Lebanon untuk merelokasi pasukan Suriah. sedangkan pengertian teori sendiri adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan

fenomena secara ilmiah¹⁰ Menurut William D Coplin pengambilan keputusan suatu negara akan mempengaruhi tindakan politik luar negerinya, yang dalam konteks internasional yaitu suatu produk tindakan politik luar negeri suatu negara – pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang – yang mungkin terjadi atau yang akan diantisipasi¹¹ Para pengambil keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kondisi dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks internasional

Skema Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri

oleh William D. Coplin digambarkan sebagai berikut¹²



¹⁰ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1998. halaman 161

¹¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah Toeritis*, edisi kedua, Sinar Baru, Bandung, 1992. halaman 30

¹² Djumadi M. Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, Revisi Oktober 2004. hal. 60

Teori diatas menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan keputusan luar negeri oleh suatu negara dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

1. *Domestic Politic* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.

Pembuatan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keadaan politik dalam negeri yang sedang terjadi atau tuntutan yang sedang berlangsung di dalam negeri.

Latar Belakang Sosio Historis rakyat Lebanon yang terdiri dari berbagai sekte keagamaan, suku, faksi politik dsb mengakibatkan rentannya negara ini terhadap konflik dalam negeri. Pertikaian antara Maronit, Druze, Sunni dan Syiah merupakan persaingan historis yang sukar diselesaikan.

Dalam tubuh pemerintahan sering terjadi perbedaan pendapat dan ketidaksamaan langkah serta sikap dalam membuat kebijakan, karena pejabat-pejabat mempertahankan sikap yang *confessional oriented* (pemisahan terhadap golongan). Demikian pula kekuasaan Presiden yang sangat besar, sangat membatasi tindakan Perdana Menterinya, sehingga distribusi kekuasaan tidak seimbang.

Dalam sistem politik dan pemerintahan di Libanon. Pakta Nasional 1943 mempunyai kedudukan sebagai suatu sumbu utama. Pakta inilah yang mengatur pembagian kekuasaan diantara golongan-golongan dalam masyarakat dan pakta ini pulalah yang mengakui secara resmi penggolongan masyarakat Libanon berdasarkan agamanya. Pakta nasional mempunyai

fungsi dilematis salah satu sisi sebagai pemersatu golongan-golongan yang ada di Libanon namun juga sebagai faktor penyebab pecahnya perang saudara 1958 dan 1975. Yang melahirkan intervensi asing termasuk Suriah dalam politik domestik Libanon.

Eksistensi militer Suriah di Libanon mulai terusik dengan disahkannya Perjanjian Taif tahun 1989 yang difasilitasi negara-negara Arab sebagai undang-undang, yang merupakan konstitusi baru Libanon dan mengurangi kekuasaan minoritas Kristen. Rencana itu ditujukan pada oposisi Kristen karena kelompok itu gagal menjamin penarikan tentara Suriah. Oposisi malah menyerukan agar Suriah mengerahkan kembali 40.000 tentaranya ke Lembah Bekaa. Dengan dibentuknya Perjanjian Taif tersebut perundingan penarikan pasukan Suriah mulai dirundingkan antara Damaskus dan Beirut.

Namun hingga pasca Israel mundur dari Libanon Selatan, Suriah hanya mengurangi tentaranya menjadi 14.000 dari yang sebelumnya berjumlah 40.000. Pasukan suriah ini memperkuat kontrol politik, militer, dan ekonomi Libanon. Eksistensi militer Suriah di Libanon ini tidak terlepas dari pengaruh politiknya terhadap pemerintah saat itu hingga terakhir penarikan pada April 2005 lalu. Presiden terpilih Emil Lahoud merupakan sosok yang dikenal sangat mendukung keberadaan militer Suriah di Libanon. Ia menjabat mulai tahun 1998 hingga sekarang. Seharusnya masa presiden Emil Lahoud berakhir pada tahun 2004 namun Pada September 2004, parlemen mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Emile Lahoud

dukungan Suriah selama tiga tahun lagi. Perpanjangan itu dibarengi dengan meningkatnya tekanan kepada Suriah meski banyak ditentang. Beberapa menteri mundur, termasuk PM Rafik al-Hariri sebulan kemudian. Ini merupakan awal dari ketegangan yang timbul antara rakyat Lebanon khususnya golongan sunni dengan pemerintahan yang pro-suriah.

Ketegangan ini memuncak Pasca tragedi terbunuhnya PM Rafiq al-Hariri (14 Februari 2005) suhu politik dalam negeri Libanon memanans unsur-unsur pertikaian dengan latar belakang SARA mulai muncul dengan adanya aksi unjuk rasa besar-besaran dari kaum Sunni dan kubu oposisi parlemen yang menuntut penarikan mundur pasukan Suriah yang diduga secara langsung atau tidak adalah penyebab terbunuhnya mantan PM yang berlatar belakang Sunni ini. Mereka juga menuntut Suriah untuk menaati Perjanjian Taif 1989 sebagai konstitusi baru Libanon pasca Perang Saudara 1990. Disamping itu juga muncul aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah yang didukung oleh kalangan Syiah namun kelompok ini mendukung eksistensi militer Suriah di Libanon. Tuntutan-tuntan dalam negeri ini memicu pemerintah Libanon untuk berunding dengan pemerintah Suriah yang akhirnya memutuskan untuk merelokasi seluruh militer Suriah yang ada di Libanon dengan jumlah kurang lebih 14.000 pasukan guna menghindari meluasnya konflik yang lebih besar di masyarakat Libanon.

Sebelum pembunuhan terhadap Hariri, pertentangan antara oposisi dan

pemerintah lebih mengikuti garis politik, bukan pertentangan sektarian. Kelompok oposisi menginginkan agar Lebanon benar-benar melepaskan diri dari campur tangan asing, Suriah. Akan tetapi, setelah tragedi Hariri muncul kekhawatiran bahwa konflik sektarian akan kembali pecah.

Kondisi domestik politik Lebanon diperparah dengan mundurnya PM Omar Karami pada 3 Maret 2005 hal ini disebabkan karena desakan Parlemen Libanon yang menyatakan ketidakpercayaannya pada pemerintah dalam menangani kasus pembunuhan Al-Hariri dan melarang warganya untuk melakukan aksi unjuk rasa terhadap kehadiran pasukan Suriah. Namun, Karami kembali dipercaya untuk membentuk kabinet setelah sebagian besar anggota parlemen yang pro Suriah menyetujuinya namun sayangnya ia gagal membentuk pemerintahan baru dan kembali mengundurkan diri pada 13 April 2005. Najib Mikati kemudian terpilih menjadi perdana menteri yang baru pada 15 April 2005 untuk mempersiapkan Pemilu pasca mundurnya militer Suriah Mei 2005. Najib Mikati dikenal sebagai pengusaha kaya yang pro Suriah.

2. Kapabilitas ekonomi dan militer. Yang mempengaruhi Kemampuan diplomasi di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri karena juga akan mempengaruhi *power* yang bersifat *pressure* dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang militer dan ekonominya kuat

akan memperoleh keuntungan yang lebih dalam hubungannya dengan negara lain, negara yang kuat tersebut bisa membantu atau menghukum negara yang lemah.

Beirut, ibukota Lebanon di masa lalu, sebelum dilanda perang saudara terkenal sebagai "Paris Timur Tengah". Ibukota negeri yang bergunung-gunung ini memang terkenal kecantikannya". Udaranya nyaman dan banyak orang suka bertamasya di pantai-pantai Lebanon.. Para ahli ekonomi dunia mengatakan, Lebanon tak bersandar pada sumber-sumber yang jelas seperti minyak, tapi rakyatnya makmur. Lembah Bekaa yang sudah subur menyediakan rakyat Lebanon sayur-mayur yang diekspor ke berbagai negara Timur Tengah dan negara-negara Barat. Perairannya pun memberi rezeki besar bagi nelayan Lebanon.

Orang mengatakan Lebanon merupakan Negara Bank. Karena prestasi ahli banknya konon membayangi bank-bank Swiss. Selain itu Lebanon merupakan negara transito lantaran jadi lalu lintas barang dan ke dunia Arab, dimana para Sheik dan raja-raja minyak Arab banyak yang menanam uangnya di Bank Lebanon.

Perang saudara tahun 1975-1990 telah menghancurkan ekonomi politik Lebanon. Pasca itu Lebanon kembali bangkit dengan restrukturisasi ekonomi yang disertai dengan stabilnya kondisi dalam negeri. Bangkitnya kembali perekonomian Lebanon tidak terlepas dari peran PM Rafiq al-Hariri yang menjabat PM pada tahun 1992-1998 hingga 2000-2004, Hariri merupakan

seorang milyader kaya dengan relasi ekonomi luar negeri yang mantap merupakan sosok politisi yang dijuluki Bapak Pembangunan Libanon karena jasa-jasanya dalam pembangunan. Kebijakan-kebijakan ekonomi seperti privatisasi dan investasi berhasil mengeluarkan Libanon dari kehancuran Perang saudara. Hingga tahun 2004 Libanon memiliki GDP sebesar 18.83 milyar dollar dan pendapatan perkapita \$5000

Mempertahankan keberadaan militer Suriah pasca tragedi terbunuhnya mantan PM Rafiq-al-hariri dikhawatirkan akan menimbulkan krisis ekonomi seperti saat perang saudara (1975-1990) sebagai akibat situasi politik dalam dan luar negeri yang tidak stabil. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi nasional yang tidak memiliki ketergantungan pada perekonomian Suriah menjadikan Libanon berinisiatif untuk merelokasi militer Suriah. sedangkan dibidang militer, Libanon memiliki 974.363 personil yang diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional tanpa bantuan pihak Suriah.

3. Konteks internasional, diartikan sebagai suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang yang mungkin atau akan diantisipasi.

Proses pembuatan keputusan luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor ini melihat perilaku negara yang harus menyesuaikan sikap dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan internasional. Secara tradisional para analis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antar negara

dengan kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku.

Pengaruh pertikaian Arab-Israel (1948-1949) dalam percaturan politik dalam negeri Libanon adalah pihak-pihak yang bersengketa selalu memandang Libanon sebagai salah satu pangkalan yang amat strategis, terutama apabila terjadi pertempuran antar mereka. Suriah memandang Libanon sebagai suatu bagian yang sangat mutlak dalam pemeliharaan keamanan nasional dan kepentingan nasionalnya. Demikian pula karena Libanon adalah satu-satunya jalan ke laut tengah yang paling dekat bagi Suriah. Sedangkan gerilyawan Palestina dan kelompok pengungsinya sebelum terusir tahun 1982 memandang Libanon sebagai salah satu basis yang mutlak dipertahankan bagi kelangsungan perjuangannya, mengingat basis mereka di negara-negara lain harus selalu mengikuti *policy* penguasa setempat.

Libanon adalah satu-satunya negara yang menerima semua kelompok gerilya Palestina dan memberikan kebebasan yang relatif besar kepada mereka. Kehadiran mereka di Lebanon disambut dengan tangan terbuka oleh golongan muslim. Mereka memang diharapkan oleh golongan muslim sebagai backing yang akan membantu menantang dominasi kekuasaan golongan Kristen. Sebaliknya golongan kristen merasa tidak senang dengan kehadiran gerilya Palestina dan kelompok pengungsinya di Lebanon. Dengan demikian kehadiran gerilya Palestina dan kelompok pengungsinya disana, sekaligus menjadi pokok dan pihak sengketa dalam perang saudara 1975 di Libanon.

Setelah gerilya Palestina hengkang dari Libanon pasca invasi Israel tahun 1982, militer Suriah masih bercokol di Libanon dengan membantu milisi Muslim Libanon untuk mengusir Israel. Keterlibatan suriah berlarut-larut dengan mempengaruhi sistem politik dan ekonomi Libanon guna mempertahankan militernya di Libanon.

Keberadaan pasukan Suriah di Libanon menjadi pertentangan banyak pihak khususnya dimata internasional. Seharusnya Suriah telah menarik pasukan militernya pasca perang saudara tahun 1990 setelah di deklarasikan Perjanjian Taif namun selama 15 tahun militer Suriah tetap beroperasi di Libanon (1990-2005). Dunia Internasional menganggap keberadaan militer Suriah akan menghambat proses demokrasi di Libanon.

Invasi AS ke Irak dan Afganistan dalam isu terorisme dan demokratisasi Timur Tengah mulai menyudutkan peran Suriah di Libanon. Akhirnya Tekanan-tekanan internasional ini memuncak pasca tragedi terbunuhnya Hariri. Pada 20 September 2004 DK PBB mengeluarkan resolusi 1559 atas prakarsa AS, Perancis dan Uni Eropa, yang meminta Suriah menarik mundur pasukannya namun ditanggapi negatif oleh pemerintah Libanon dibawah Presiden Emil Lahoud dan PM Omar karami yang pro-Suriah dan pemerintah Suriah sendiri. Pasca tragedi Hariri, Libanon dan Suriah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk tidak berunding dalam hal penarikan mundur militer Suriah. Terutama pada pemerintah Suriah. AS akan mempertegas sanksinya jika Suriah menolak menarik mundur militernya dari Libanon.

Penarikan militer Suriah ini juga tidak terlepas dari pengaruh Israel sebagai sekutu terdekat AS di Timur Tengah. Perlawanan rakyat Libanon dibawah Hizbullah (Libanon Selatan) akan mengancam keamanan Israel melihat kedekatan Hizbullah dengan kelompok perjuangan Palestina. Dan Suriah sendiri dituduh sebagai pelindung utama perjuangan gerakan Hizbullah dalam memerangi gerakan zionis Israel. Selain itu Israel juga berkepentingan untuk menciptakan pemerintahan Libanon yang pro-barat guna mempermudah hubungan diplomatik yang terhambat dengan berkuasanya pemerintahan pro Suriah.

D. Hipotesa

Pemerintah Libanon menyetujui merelokasi seluruh militer Suriah yang selama 29 tahun (1976-2005) telah berada di Libanon, dikarenakan dua faktor yaitu :

1. Faktor Internal :
 - A. Tekanan Kubu oposisi parlemen dan sebagian rakyat Libanon yang menginginkan penarikan Militer Suriah yang diduga terlibat dalam pembunuhan mantan PM Rafiq al-Hariri serta tuntutan kepada Suriah untuk menaati Perjanjian Taif 1989.
 - B. Kemampuan ekonomi dan militer Libanon menjelang tahun 2005 telah meningkat tajam sehingga tidak membutuhkan bantuan Suriah lagi. Yang didukung dengan peristiwa keluarnya Israel tahun 2000 dari Libanon Selatan sehingga mengurangi beban kerja militer Libanon dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

2. Faktor Eksternal

Tekanan dunia internasional yang diprakarsai oleh Amerika dan Israel untuk mengakhiri dominasi militer Suriah di Libanon. Yang diikuti oleh melemahnya kekuatan nasional Suriah pasca runtuhnya Uni Sovyet.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian skripsi ini dibatasi oleh dua hal. Yang pertama adalah batasan ruang lingkup sedangkan yang kedua adalah batasan waktu. Hal ini adalah untuk memungkinkan kerangka pembahasan dalam skripsi ini tidak kabur dan menyimpang dari pokok masalah dan sasaran yang dituju dapat dijangkau dengan tepat.

Adapun jangkauan penelitian ini adalah

1. Dari segi ruang lingkup meliputi wilayah yang dikenal sebagai Republik Lebanon, tanpa mengecilkkan arti daerah dan negara yang berada disekitarnya
2. Dari segi waktu, penelitian ini meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2000 ketika Israel mundur dari Libanon Selatan, yang terfokus pada unsur-unsur penyebab kebijakan relokasi Militer Suriah dari Libanon hingga pada saat penarikan seluruh militer Suriah pada April 2005.

Namun penelitian ini juga tidak bisa dilepaskan pada sejarah negara Lebanon sebelum dan sesudah perang saudara tahun 1970-an yang melatar belakangi eksistensi militer Suriah di Libanon. Keterkaitan sejarah yang kompleks menyebabkan penelitian ini selalu menghubungkan peristiwa-peristiwa masa

lampau Libanon dengan kondisi kontemporer pada masalah relokasi militer Suriah.

F. Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai dua tujuan yaitu umum dan tujuan khusus

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk meneliti latar belakang serta hal-hal yang menyebabkan pemerintah Libanon mengambil kebijakan untuk merelokasi militer Suriah pasca tragedi terbunuhnya PM Rafiq al-Hariri mengingat eksistensi militer Suriah yang telah berlangsung selama 29 tahun (1976-2005). Demikian pula kaitannya dengan pihak asing yang mempengaruhi kebijakan Libanon tersebut.

Disamping itu tujuan penulisan ini diarahkan guna pengembangan kemampuan penulis untuk mentransformasikan teori-teori studi hubungan internasional guna menganalisa masalah dunia internasional. Tujuan penelitian ini juga diarahkan untuk memenuhi syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Fakultas Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif artinya berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan dengan data empiris, spesifiknya tahap Pertama berupa studi kasus kebijakan relokasi militer Suriah tahun 2005. Kedua analisa terhadap tema tersebut dan yang ketiga pengumpulan data (data gathering) untuk menjadikan hasil penelitian lebih ilmiah. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang diperoleh dari data sekunder yang berupa buku-buku, majalah, Surat kabar, internet serta jurnal-jurnal ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mempunyai susunan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang Republik Libanon, yang meliputi latar belakang sejarah berdirinya serta keadaan geografi dan keadaan penduduk Libanon. Disamping itu akan dibahas pula tentang kondisi politik domestik Libanon dimana terjadi Perang Saudara tahun 1975, yang berdampak pada kondisi ekonomi militer serta hubungan politik luar negeri Libanon.

Bab Ketiga, berisi tentang dinamika hubungan politik Libanon dan Suriah, yang meliputi pembahasan tentang proses awal keterlibatan Suriah di Libanon dan tujuan campur tangannya serta akan digambarkan pula tentang proses keluarnya militer Suriah dari Libanon pada tahun 2005 sebagai puncak pengurangan keterlibatan militer Suriah yang telah berlangsung sejak Perang Dingin berakhir.

Bab Keempat, difokuskan pada latar belakang relokasi militer Suriah oleh Libanon. Meliputi Latar Belakang Kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kondisi politik domestik dan kondisi ekonomi Libanon serta faktor eksternal yang berupa pengaruh dunia internasional yang diprakarsai dan Amerika dan Israel.

Bab Kelima, berisikan Penutup yang meliputi Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Termasuk penjelasan kedudukan skripsi ini dalam studi Hubungan Internasional serta gambaran terhadap studi dan praktik Ilmu Hubungan